FORM IKK LPPD PROVINSI SULAWESI SELATAN AKHIR TA 2023
SESUAI PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) Realisasi Perikanan Tangkap = **492,159.5 ton** Realisasi Perikanan Budidaya = **4,128,072.6 ton** Target Perikanan Tangkap = **413,030.8 Ton**, Target Produksi Perikanan Budidaya = **4,298,391.1 Ton**	$= \frac{4,620,232.1}{4,711,421.9} \times 100$ **= 98.06 %**	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	1 (713) WPP	Jumlah Produksi Perikanan adalah data belum di validasi pusat
				2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	484	
				3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasinoal 17 x100% 19 jumlah seluruh pelabuhan perikanan Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	89,47%	Terdapat 17 Pelabuhan Perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasinoal dari jumlah total pelabuhan perikanan sebanyak 19 pelabuhan. Jadi Persentase pelabuhan perikanan yang standar operasional adalah 17/19 x100 % = 89,47 % 18 PPI yang memenuhi minimal 3 standar operasional yaitu : 1. PP Paotere Kota Makassar 2. PP Lappa Kab. Sinjai 3. PP Kajang Kab. Bulukumba 4. PP Bontobahari Kab. Bulukumba 5. PP Birea Kab. Bantaeng 6. PP Beba Kab. Takalar 7. PP Benteng Kab. Gowa 8. PP Bonehaleng Kab. Kepulauan selayar 9. PP Bontobahari Kab. Maros 10. PP Maccini Baji Kab. pangkep 11. PP Sumpang Binangae Kab. barru 12. PP Cemopae Kota Pare-Pare 13. PP Lonrae Kab. Bone 14. PP Ulo-Ulo Kab. Luwu 15. PP Balambang Kab. Luwu 16. PP Pontap Kota Palopo
				4)	Jumlah izin \pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	SIUP = 484 Unit Kapal BPKP = 685 Unit Kapal Ket : SIUP : 10 - 30 GT BPKP : >5 - 10 GT	
				5)	Jumlah kapal yang+G12 terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	997 Unit Kapal	
				6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	25	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku $x = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{ci}{si}\right) . 100\%$	$x = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{ci}{si}\right) . 100\%$ --- n Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP	**56.35 %**	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku $\frac{578.438.83}{9.439.985}$ x 100 % luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	6.13%	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah kawasan konservasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri KKP RI yaitu Liukang Tupabiring Kab. Pangkep = 63.582,49 Ha dan KKP3K Liukang tangaya Kab.Pangkep seluas = 508.534,30. Sehingga total luasan adalah 569.269,57 Ha
				2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif $\frac{5}{13}$ x100% keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	38.46%	Realisasi jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif adalah 5 kawasan yaitu 2 kawasan sudah ditetapkan sesuai Kepmen KKP RI dan 3 Kawasan menunggu/proses penetapan Keputusan Menteri. Jumlah seluruh kawasan konservasi perairan adalah 13 kawasan sesuai Perda No 3 tahun 2022
				3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	554	
				4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	7	
				5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	7	

NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN IKK OUTPUT	KET.
				6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	5	Ada 5 Pelaku yang usaha yang di periksa, namun semua tidak patuh karena tidak memiliki izin disebabkan ke tidak pahaman dalam proses pembuatan izin
				7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	52 Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawasan)	
				8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	5 izin usaha yang diterbitkan	

Makassar, Maret 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. M. ILYAS, ST., M.S.Sc
Nip. 19700606 199603 1 006